

IMPLIKASI AKREDITASI SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU TATA KELOLA SMK NEGERI 1 OKU

Uum Gatot Karyanto¹, Arif Rahman², Darwin³

¹Guru SMA Negeri 3 OKU, Sumatera Selatan; uumkarya@yahoo.com

²Dosen Fakultas Teknik – UNIMED; ³Dosen Fakultas Teknik - UNIMED

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) nilai komponen, nilai akhir, dan peringkat akreditasi sebagai hasil akreditasi sekolah; (2) tindak lanjut atas hasil akreditasi sekolah yang dilakukan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola sekolah; dan (3) implikasi akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu tata kelola sekolah pada SMKN 1 OKU. Penelitian didesain menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengambilan sampel situsai sosial yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. “Populasi”-nya sekaligus sebagai informan kunci yaitu para pemangku kepentingan SMKN 1 OKU. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam adalah (1) observasi, (2) wawancara, (3) studi dokumen, dan (4) triangulasi. Analisis data menggunakan Model Miles & Huberman, meliputi (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan/verifikasi. Untuk menetapkan keabsahan data digunakan empat kriteria: (1) kredibilitas, (2) transferabilitas, (3) dependabilitas, dan (4) komfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) pencapaian SNP oleh SMKN 1 OKU untuk semua program keahlian yang diakreditasi mencapai rata-rata bobot maksimal dan dikategorikan sebagai “mendukung fungsi semua komponen dalam proses pembelajaran yang sangat baik”; (2) tindak lanjut atas refleksi terhadap hasil akreditasi dilakukan dalam melalui mekanisme (a) *Opening Meeting Audit Internal* (OM), (b) *Closing Meeting Audit Internal* (CM), dan (c) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau pola OM-CM-RTM; (3) akreditasi sekolah hanya berimplikasi terhadap 9 dari 24 komponen (37,5%) tata kelola sekolah.

Kata-kata kunci: akreditasi sekolah, peningkatan mutu, tata kelola sekolah

Abstract

The aims of this research are to describe: (1) the component value, the final value, and the accreditation rank as the results of school accreditation; (2) the follow-up action toward the results of school accreditation that was done by school stakeholders in improving the school governance quality; and (3) the implication of school accreditation toward the improvement of school governance quality of SMKN 1. The research is designed in qualitative approach that was operationalized by a case study method. The acquiring of social situation sample technique in this research use the purposive sampling technique. The “population” all at once as key informan i.e. SMKN 1 OKU’s stakeholders. The technique of data collection that used in this research are (1) observation, (2) interview, (3) document study, and (4) triangulation. The data analysis used Miles & Huberman Model including: (1) data reduction, (2) data display, and (3) concluding drawing/verification. To assure trustworthiness of data in this research used four criteria: (1) credibility, (2) transferability, (3) dependability, dan (4) confirmability. The results of this research revealed: (1) the national education standard achievement of SMKN 1 OKU for all expertise program that accredited was attain a maximal grade average and categorized as “encouraged all component function in the best learning process”; (2) the follow-up action of accreditation results of SMKN 1 OKU held with an activities combination through mechanism as follows: (a) opening meeting audit internal, (b) closing meeting audit internal, and (c) management review meeting or OM-CM-RTM pattern; (3) The school accreditation has only impacting on 9 of 24 or (37,5%) school governance components.

Keywords: school accreditation, quality improvement, school governance

PENDAHULUAN

Akreditasi, sebagaimana evaluasi dan sertifikasi, menurut Pasal 2 Ayat 2 PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, dilakukan dalam rangka menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan. Akreditasi, berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, merupakan program yang dilakukan dalam rangka reformasi layanan yang sasarannya adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. (3) Dalam pandangan Suryana (2007: 3), akreditasi mengarah kepada penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan kedudukannya dapat dijadikan alat regulasi diri (*self-regulation*) yang memungkinkan sekolah/madrasah (S/M) mengenal dan memahami kekuatan dan kelemahannya. Dengan demikian, idealnya proses dan hasil akreditasi S/M dapat dijadikan (1) bahan refleksi dan evaluasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) S/M tentang kelebihan dan kelemahan S/M, (2) bahan motivasi bagi pihak manajemen S/M untuk melakukan upaya-upaya yang terencana dan berkelanjutan dalam meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, dan (3) dasar yang memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa S/M telah dan akan melaksanakan berbagai program kerja dengan sumber daya yang dimilikinya secara sungguh-sungguh agar terjadi proses pendidikan yang bermutu dan menghasilkan keluaran (*output*) yang bermutu pula.

Namun kenyataannya, BSNP (2011: 124—125), misalnya, mengungkapkan bahwa hasil akreditasi S/M masih menyisakan beberapa catatan yang belum menggembirakan sebagai berikut. (1) Kepemilikan RKAT hanya 79% dan RKJM 66%. (2) Hanya 59% S/M memiliki RKAT yang memuat semua elemen yang disyaratkan dalam Standar Pengelolaan. (3) Hanya 35% SM yang melibatkan dewan guru dan komite sekolah pada proses dan akhir penyusunan RKJM dan RKAT. (4) Dalam penetapan RKJM dan RKAT hanya 60% S/M yang mendapat pertimbangan komite S/M dan disetujui dalam rapat dewan guru serta disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama. (5) Hanya 23% kepala S/M yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan S/M kepada rapat dewan guru maupun rapat komite S/M. (6) Hanya 49% S/M yang memiliki dokumen SIM dan dokumen Program Pengawasan. (7) Hanya 63% S/M yang melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam bertugas. Fakta lain dikemukakan oleh Soedjono (2012: 156) yang mengungkapkan bahwa penyelenggaraan akreditasi S/M saat ini (1) belum menggambarkan kondisi objektif S/M (2) belum menunjukkan indikator akuntabilitas; (3) belum dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan; (4) belum mampu menggambarkan kelayakan S/M; dan (5) belum mampu memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan.

Fakta-fakta di atas merupakan gambaran riil pada skala nasional. Lalu,

bagaimanakah gambaran riil yang ada pada S/M yang *notabene* merupakan sumber data pada skala nasional itu melalui implementasi akreditasi S/M? Pertanyaan ini menarik karena setiap S/M tentu saja memiliki karakteristik dan kompleksitas permasalahan tata kelola tersendiri. Jika benar bahwa akreditasi dapat dijadikan alat regulasi diri sebagaimana dikemukakan Suryana di atas, pertanyaan berikutnya yang tidak kalah menarik antara lain adalah bagaimanakah implikasi akreditasi S/M terhadap peningkatan mutu tata kelola S/M.

Dengan mempertimbangkan dialektika antara kondisi ideal dan kondisi riil di atas, fokus yang dipilih dalam penelitian ini dikonsentrasikan pada implikasi akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu tata kelola sekolah. Fokus ini disederhanakan dengan tiga pembatasan: (1) subjek penelitiannya adalah pemangku-pemangku kepentingan sekolah; (2) komponen SNP yang diteliti adalah Standar Pengelolaan; dan (3) lokasi penelitian berupa situs tunggal (*within-site*), yakni SMKN 1 Ogan Komering Ulu (selanjutnya: *OKU*). Penelitian ini diupayakan untuk mendeskripsikan data dan informasi yang relatif memadai tentang implikasi akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu tata kelola sekolah dengan rumusan masalah: (1) bagaimanakah nilai komponen, nilai akhir, dan peringkat akreditasi SMKN 1 OKU sebagai hasil akreditasi sekolah; (2) bagaimanakah pemangku kepentingan SMKN 1 OKU menindaklanjuti hasil akreditasi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu tata

kelola sekolah; dan (3) bagaimanakah implikasi akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu tata kelola sekolah pada SMKN 1 OKU sebagai hasil tindak lanjut atas hasil akreditasi sekolah.

Akreditasi, menurut Montagu (2003: 4), adalah suatu pemantauan eksternal terhadap kualitas atau mutu berlandaskan empat komponen prinsipial, yaitu (1) didasarkan pada standar tertulis dan terpublikasi; (2) pemantauannya dilakukan oleh pakar sejawat; (3) prosesnya dikelola oleh badan atau lembaga independen; dan (4) tujuannya mendorong pengembangan organisasional. Definisi-definisi akreditasi dalam konteks institusi pendidikan didasarkan pada definisi umum seperti itu. Definisi-definisi dari The Council of Higher Education Accreditation/CHEA (2002: 1), Koenig (2004: 2), Seto & Wells [ed.] (2007: 25), dan The Accrediting Council for Independent Colleges and Schools/ACICS (2014: 77) memiliki persamaan dalam konteks (1) akreditasi merupakan suatu proses pemantauan atau evaluasi terhadap kualitas institusi pendidikan; (2) pemantauan atau evaluasi itu dilakukan secara eksternal; (3) untuk menetapkan kualitas itu digunakan kriteria atau standar minimal; dan (4) proses pemantauan atau evaluasi itu bermuara pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi berbeda dalam konteks (1) sasaran akreditasi dan (2) siapa yang melakukan akreditasi. Seto & Wells [ed.] dan CHEA menegaskan bahwa sasaran akreditasi adalah institusi atau program pendidikan tinggi, sedangkan dalam pandangan Koenig dan ACICS, sasaran akreditasi tidak

dikhususkan kepada institusi pendidikan tinggi.

Dari literatur Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional (2011: 13) mendefinisikan akreditasi sebagai kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. Dalam penelitian ini definisi yang disebutkan terakhir yang digunakan. Definisi itu didasarkan pada rumusan (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (2) PP 19/2005, dan (3) Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional S/M.

Konsep mutu hampir selalu dikaitkan dengan konsep pengendalian mutu (*quality control*), penjaminan mutu (*quality assurance*), dan manajemen mutu terpadu (*total quality management*). Dalam konteks pendidikan, Sallis (2005: 21—22) mengemukakan bahwa mutu yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pelanggan pendidikan terdiri atas dua aspek, yaitu (1) *pelanggan internal* dan (2) *pelanggan eksternal* sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pelanggan internal adalah kepala sekolah

(KS), guru, dan staf kependidikan lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga kelompok, yaitu *pelanggan eksternal primer* (peserta didik), *pelanggan eksternal sekunder* (orang tua dan para pemimpin pemerintahan), dan *pelanggan eksternal tersier* (pasar kerja dan masyarakat luas).

Maile (2012: 326) berdasarkan Potgieter, Visser, Van der Bank, Mothata, & Squelch (1997: 11) menyatakan bahwa tata kelola sekolah merupakan suatu tindakan menentukan kebijakan dan peraturan-peraturan yang memungkinkan sebuah sekolah dapat diorganisasikan dan dikontrol. Bagi The Auditor-General (1988: B2) tata kelola sekolah merupakan penggunaan kekuatan sumber daya manajemen. Sementara itu, bagi Buckland dan Hofmeyr (1993: 30), tata kelola sekolah adalah proses keseluruhan di mana kebijakan pendidikan diformulasikan, diadopsi, diimplementasikan, dan dimonitor. Berdasarkan definisi-definisi ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola sekolah adalah suatu proses penerapan manajemen sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang efektif dan efisien melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif yang dioperasionalkan dengan metode studi kasus (*case study*) terhadap situs tunggal (*within-side*). Moleong (2013: 6) berdasarkan Williams (1995) dan Denzin dan Lincoln (1987) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun, studi kasus menurut Craswell (1998: 61; sebagaimana dikemukakan Sagala, 2007: 88) adalah suatu eksplorasi dari suatu sistem yang utuh (*a bounded system*) atau dari suatu maupun beberapa kasus dalam suatu waktu tertentu yang dilakukan dengan mengoreksi data secara mendalam yang melibatkan beberapa sumber informasi dan kaya akan konteks.

Sampel situasi sosial sekaligus informan kunci penelitian ini adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) SMKN 1 OKU yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Mereka dipilih karena diperkirakan (1) menguasai atau memahami informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini; (2) sedang berkecimpung atau terlibat dengan kegiatan yang diteliti; (3) mempunyai kesempatan atau waktu untuk dimintai informasi; dan (4) dipandang tidak memberikan keterangan atas dasar kemasannya sendiri tetapi sesuai kondisi riil yang menjadi tanggung jawabnya. Penarikan sampel atau situasi sosial tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang mana yang akan diamati, tetapi juga mengenai latar-latar, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) observasi, (2)

wawancara, (3) studi dokumen, dan (4) triangulasi. Observasi yang dilaksanakan adalah *observasi terus terang atau tersamar*. Dengan mempertimbangkan keperluan menjaga agar wawancara berlangsung secara alamiah, tetapi tetap terarah kepada topik dan sub-subtopik yang ditentukan, wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan *teknik semiterstruktur*. Studi dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen berupa apa pun yang relevan untuk mendukung dan memperkaya informasi-informasi atau data yang diperoleh melalui proses observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan mempertimbangkan kebutuhan peneliti untuk lebih memahami data dan informasi yang ditemukan dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan Model Miles & Huberman. Sugiyono (2011: 337—345) menguraikan model ini sebagai berikut. (1) Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. (2) Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. (3) Aktivitas dalam analisis data meliputi (a) reduksi data (*data reduction*), (b) penyajian data (*data display*), dan (c) kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Nilai Komponen, Nilai Akhir, dan Peringkat Akreditasi

Dengan perolehan nilai komponen (NK) pada kisaran 90 s.d. 98; nilai akhir (NA) = 95 untuk Program Keahlian Pemasaran dan 96 untuk Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran; serta peringkat akreditasi = A ('Sangat Baik') untuk semua program keahlian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan SNP oleh SMKN 1 OKU untuk semua program keahlian yang diakreditasi mencapai rata-rata bobot maksimal yang berdasarkan Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMK/MAK dikategorikan sebagai "mendukung fungsi semua komponen dalam proses pembelajaran yang sangat baik".

2. Tindak Lanjut atas Hasil Akreditasi

Tindak lanjut atas hasil akreditasi sekolah—sebagaimana juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan *assessment* lainnya—dilakukan melalui prosedur internal yang bersifat terpadu (holistik) yakni Opening Meeting-Closing Meeting-Rapat Tinjauan Manajemen (OM-CM-RTM) yang melibatkan prosedur audit internal dan tindakan perbaikan (TP) yang secara keseluruhan merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM). Hasil analisis terhadap implementasi mekanisme OM-CM-RTM memperlihatkan hal-hal sebagai berikut.

1) Pemenuhan keperluan data untuk mekanisme ini tidak sulit dilakukan karena melalui kendali penerapan prosedur mutu sebagai "ruh" SMM telah terbangun tradisi pengendalian arsip dan dokumentasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi personalia yang diorganisasikan dalam

Struktur Organisasi Tenaga Pendidik (SOTP) dan Struktur Organisasi Tenaga Kependidikan (SOTK).

2) Tindak lanjut atas hasil-hasil akreditasi sekolah dengan implementasi mekanisme OM-CM-RTM ini dilakukan dengan langkah-langkah: (1) sosialisasi kepada seluruh personel sekolah tentang hasil-hasil akreditasi sekolah; (2) seluruh personel sekolah merefleksi hasil-hasil akreditasi sekolah secara umum; (3) staf terkait menginventarisasi secara lebih spesifik hasil-hasil akreditasi sekolah yang akan digunakan sebagai bahan audit internal yang akan dilakukan secara *cross-sectional*; (4) audit internal atas bahan-bahan yang telah disiapkan oleh staf terkait; (5) hasil-hasil audit internal dipresentasikan oleh wakil kepala sekolah (WK) Manajemen Mutu (MM), dievaluasi secara bersama-sama, dan dicarikan alternatif pemecahannya; (6) berdasarkan hasil evaluasi itu, tiap bidang tersebut menindaklanjuti temuan-temuan yang teridentifikasi; (7) WK MM mengecek ulang hasil tindak lanjut temuan-temuan; (8) semua temuan, tindak lanjut atas temuan-temuan, dan hasil tindak lanjut atas temuan-temuan, diinventarisasi dan dibahas bersama KS untuk dicarikan jalan pemecahannya.

3. Implikasi Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Tata Kelola Sekolah

3.1 . Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Sejak tahun 2011 visi, misi, dan tujuan sekolah telah mengalami dua kali perubahan dengan mempertimbangkan: (1) tidak dilanjutkannya program RSBI, (2) pergantian kurikulum, dan (3) rencana menjadi Sekolah Rujukan. Perubahan visi, misi, dan tujuan sekolah awalnya dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa SMKN 1 OKU tidak lagi berstatus RSBI karena program itu tidak dilanjutkan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012. Perubahan berikutnya dilakukan karena terjadi pergantian kurikulum, yaitu dari Kurikulum 2006 (KTSP) ke Kurikulum 2013 (K-13) lalu kembali ke KTSP dan kemungkinan kembali lagi ke K-13. Perubahan redaksional visi, misi, dan tujuan sekolah dilakukan untuk mengakomodasi tuntutan landasan filosofis K-13 yang mengedepankan pembangunan karakter terpuji (*virtue character*). Karena SMKN 1 OKU direncanakan menjadi Sekolah Rujukan di Kabupaten OKU, terbuka kemungkinan pada renstra berikutnya yang sedang dalam proses finalisasi rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah itu akan mengalami perubahan lagi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan dan kemudian perubahan rumusan redaksional visi, misi, dan tujuan sekolah tidak teridentifikasi adanya implikasi hasil-hasil akreditasi sekolah.

3.2 RKJM dan RKT

Desain RKJM dan RKT SMKN 1 OKU secara substansial antara lain (1) diwarnai oleh tuntutan tata kelola yang jauh lebih baik sebagai implikasi penerapan program RSBI, dan kemudian ISO 9001: 2008 (selanjutnya: *ISO*); (2) meskipun program RSBI dihentikan, RKJM dan RKT berorientasi kepada sasaran-sasaran RSBI dan ISO; (3) RKT dikembangkan dari RKJM dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan terbaru, termasuk peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan *assessment* akreditasi sekolah; (4) realisasi RKJM dan RKT dievaluasi melalui mekanisme audit internal SMM dengan menggunakan prosedur Evaluasi Proses Pelaksanaan (EPP). (5) EPP atas RKJM dilakukan terhadap perencanaan dan realisasi program sekolah secara keseluruhan, sedangkan EPP atas RKT dilakukan terhadap masing-masing bidang. Dengan

demikian, akreditasi sekolah hanya berimplikasi terhadap pengembangan RKT, tetapi tidak terhadap pengembangan RKJM.

3.3 . Pedoman Berbagai Aspek Pengelolaan

Pedoman berbagai aspek pengelolaan meliputi dokumen-dokumen (1) kurikulum, (2) kalender pendidikan, (3) struktur organisasi, (4) pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, (5) peraturan akademik, (6) tata tertib program keahlian, (7) kode etik program keahlian, dan (8) biaya operasional program keahlian. Kedelapan dokumen itu dikembangkan berdasarkan penjelasan butir soal nomor 117 Instrumen Akreditasi SMK/MAK. Baik dari segi sistematika maupun substansi penyediaan dokumen-dokumen itu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan SNP yang menjadi dasar pengembangan *assessment* akreditasi sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akreditasi sekolah berimplikasi terhadap tata kelola penyediaan dokumen-dokumen dan pemenuhan substansi berbagai aspek pengelolaan.

3.4 . Struktur Organisasi

Personalia SMKN 1 OKU diorganisasikan dalam dua struktur organisasi, yaitu (1) SOTP dan (2) SOTK. Hal menarik dalam struktur organisasi ini adalah (1) dalam SOTP, WK MM memiliki kedudukan sentral di bawah KS karena secara garis komando membawahi seluruh struktur personel SOTP, termasuk WK; (2) dalam SOTK, KS selain oleh kepala administrasi juga didampingi oleh WK MM; (3) seluruh personel SOTP dan SOTK diberi deskripsi tugas yang meliputi (a) tanggung jawab, (b) wewenang, dan (c) tugas pokok yang mengacu dan dikembangkan dari *Prosedur Mutu Pembagian Tugas Mengajar, Prosedur Mutu Kepegawaian, dan Tanggung*

Jawab, Tugas, dan Wewenang. Kedudukan strategis WK MM dan kompleksitas deskripsi tugas personel mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi tuntutan implementasi ISO yang kompleks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kreativitas KS SMKN 1 OKU dalam membentuk struktur organisasi beserta uraian tugasnya mengimplikasikan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan standar ISO dan bukan tuntutan SNP yang diakomodasi dalam program akreditasi sekolah.

3.5 . Kegiatan Kesiswaan

a. Seleksi Penerimaan Siswa Baru

Mulai tahun pelajaran 2015/2016 seleksi PSB—sekarang: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah ini dilakukan dengan penerapan sistem *online* untuk pendaftaran dan tes. PSB ini mempertimbangkan tiga komponen penilaian: (1) peringkat kelas siswa dalam LHBS (Rapor), (2) prestasi akademik dan/atau nonakademik, dan (3) hasil tes PSB *online*. Penerapan sistem *online* ini digagas oleh KS SMKN 1 OKU dan ada kaitannya dengan keinginan untuk meningkatkan mutu layanan. Pelaksanaan PSB, selain mengacu kepada dokumen internal yaitu *Prosedur Mutu Penerimaan Siswa Baru*, tetap berpedoman kepada ketentuan dari pemerintah. Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi-informasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem PSB SMKN 1 OKU dipengaruhi oleh keinginan untuk menyelenggarakan penjurangan siswa baru dengan sistem yang dianggap lebih efektif dan efisien, yaitu dengan melibatkan peranti *online*. Dalam hal ini, meskipun narasumber menyatakan bahwa sistem PSB ada

kaitannya dengan keinginan untuk meningkatkan mutu layanan SMKN 1 OKU sebagai institusi yang telah meraih sertifikat ISO, tetapi pernyataan itu tidak didukung dengan logika yang kuat karena ISO tidak mempersyaratkan sistem *online* dalam tata kelola PSB. Esensinya lebih mengarah kepada sistem layanan yang lebih efektif dan efisien yang tidak hanya dituntut untuk pemenuhan standar ISO. Di pihak lain, hal tersebut tidak pula menjadi tuntutan SNP. Dengan demikian, baik ISO maupun akreditasi sekolah tidak berimplikasi terhadap tata kelola PSB SMKN 1 OKU.

b. Layanan Konseling

Tata kelola kegiatan konseling SMKN 1 OKU mengacu kepada dokumen *Prosedur Mutu Bimbingan Konseling*. Ketentuan tentang konseling juga dimuat di dalam dokumen *Kurikulum SMKN 1 OKU*. Pada ketentuan ini diatur (1) arah pengembangan layanan BK, (2) bidang layanan BK, (3) fungsi BK, dan (4) Program Bimbingan Karier dan Konseling. Program Kerja BK meliputi (1) Program Tahunan, (2) Program Semester, (3) Program Bulanan, dan (4) Program Mingguan. Dalam pelaksanaannya program kerja BK antara lain menggunakan perangkat (1) Buku Layanan Konseling Individu, (2) buku Pelanggaran Razia Siswa, (3) Buku Penghubung Wali Kelas/Guru dan Guru BK. Hasil analisis terhadap data dan informasi tentang tata kelola konseling memperlihatkan bahwa (1) ketentuan umum tentang konseling dimuat di dalam *Kurikulum SMKN 1 OKU*; (2) struktur program kerja dan pelaksanaan BK SMKN 1 OKU tidak memperlihatkan karakteristik khusus; lebih memperlihatkan pemenuhan item-item standar pengelolaan pada SNP.

c. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kokurikuler

Tata kelola kegiatan ekstrakurikuler mengacu kepada dokumen *Prosedur Mutu Kegiatan Ekstrakurikuler*. Ketentuan tentang kegiatan ekstrakurikuler juga dimuat di dalam dokumen *Kurikulum SMKN 1 OKU*. Dalam ketentuan ini pengembangan diri dibedakan menjadi dua: (1) kegiatan ekstrakurikuler wajib dan (2) kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang meliputi (a) Pramuka, (b) Rohis, (c) PMR, (d) Seni—terdiri atas Paduan Suara, Seni Tari, dan Teater, (e) Paskibraka, (f) Olahraga, dan (g) Klub Bahasa Inggris. Keterangan-keterangan narasumber memperlihatkan adanya upaya-upaya keras untuk memberikan layanan-layanan yang terstandar dengan baik. Hal ini memperlihatkan (1) atensi personel terhadap pemenuhan standar tertinggi yang dimiliki sekolah, yaitu ISO dan (2) teridentifikasi strategi sekolah untuk menyosialisasikan standar tertinggi tersebut kepada masyarakat sehingga SMKN 1 OKU tercitrakan sebagai sekolah elitis di Kabupaten OKU. Dengan kata lain, tuntutan akreditasi sekolah tidak menjadi pertimbangan utama dalam tata kelola kegiatan ekstrakurikuler.

3.6 . Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SMKN 1 OKU dilakukan untuk menyusun dokumen-dokumen (1) Kurikulum, (2) Kalender Pendidikan, (3) Program Pembelajaran, (4) Penilaian Hasil Belajar Siswa, dan (4) Peraturan Akademik. Proses pengelolaannya memperlihatkan pengembangan dokumen-dokumen itu (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang dibentuk berdasarkan SK KS tentang TPK; (2) TPK diisi tidak hanya oleh personel internal tetapi juga melibatkan pihak

dunia usaha/dunia industri (DU/DI); (3) WK Kurikulum menentukan personel-personel yang akan dilibatkan dalam TPK setelah berkoordinasi dengan KS dan semua ketua program keahlian yang pengendaliannya dilakukan oleh WK MM; (4) penyusunan Kalender Pendidikan dilakukan dengan memedomani surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten OKU sebagai dokumen eksternal dan diselaraskan dengan agenda-agenda, kebutuhan-kebutuhan, dan kondisi sekolah; (5) kegiatan dan hasil kegiatan pengembangan kurikulum telah berdampak positif pada peningkatan kualitas program pembelajaran yang disusun oleh guru; (6) dilakukan dalam suatu rapat resmi yang dikoordinasikan oleh WK Kur; (7) melibatkan proses validasi dengan mekanisme *cross-section*. Berdasarkan fakta-fakta ini dapat dikemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran SMKN 1 OKU selain memedomani berbagai peraturan perundang-undangan, juga terutama mengimplementasikan prosedur mutu SMM yang menjadi karakteristik ISO. Dengan demikian, implementasi akreditasi sekolah bukanlah pertimbangan utama dalam tata kelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

3.7 . Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pengelolaan sarana dan sarana pembelajaran mengacu kepada dokumen (1) *Prosedur Mutu Pengadaan Barang dan Jasa*, (2) *Prosedur Mutu Pengelolaan Ruang Praktik*, (3) *Prosedur Mutu Perawatan dan Perbaikan*, dan (4) *Prosedur Mutu Perpustakaan*. Pada *Manual Mutu* dimuat antara lain ketentuan-ketentuan bahwa SMKN 1 OKU: (1) menetapkan, menyediakan, dan merawat/memelihara prasarana yang ada secara berkala

melalui program kerja. Hal ini dilakukan dengan melakukan proses pemantauan inventarisasi aset, termasuk masa berlaku dokumen izin dan melaksanakan proses pemeliharaan gedung serta peralatan pendukung; dan (2) menetapkan tata cara (1) proses pembelian, (2) informasi pembelian, dan (3) verifikasi produk/jasa yang dibeli. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka hal itu akan dikendalikan sesuai *Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan*. Sistem pengelolaan sarana dan sarana pembelajaran ini merupakan prosedur standar SMM sebagai implementasi standar ISO. Dengan demikian, akreditasi sekolah tidak berimplikasi dalam pengembangan sistem tata kelola sarana dan sarana pembelajaran pada SMKN 1 OKU.

3.8 . Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan SMKN 1 OKU diklasifikasikan dalam dua kategori kebutuhan, yaitu (a) *Biaya Personel* dan (b) *Biaya Nonpersonel*. Sumber dana pembiayaan pendidikan diperoleh dari (1) APBN, (2) BOS APBD Provinsi Sumsel, (3) BOS APBD Kabupaten OKU, dan (4) masyarakat dan lainnya (DU/DI). Sumber pembiayaan dari orang tua siswa tidak direalisasikan karena adanya Program Sekolah Gratis dari Pemerintah Provinsi Sumsel. Beberapa karakteristik pengelolaan pembiayaan dari sumber-sumber tersebut antara lain adalah: (1) Bendahara diberi kewenangan untuk melakukan proses administrasi keuangan secara keseluruhan; (2) RAPBS disusun oleh tim yang terdiri atas KS, semua WK, dan Bendahara; (3) Bendahara memedomani berbagai peraturan yang relevan, termasuk Pergub Sumsel No. 31/2009; (4) KS memiliki kewenangan menentukan struktur anggaran, tetapi tetap mempertimbangkan masukan-masukan dari tim RAPBS; (5) KS

melakukan supervisi terhadap Bendahara ketika melakukan penandatanganan laporan keuangan bulanan. Berdasarkan uraian ini, pengelolaan pembiayaan yang bersifat umum dan rutin tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan sekolah-sekolah lain karena mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sama. Untuk pengelolaan pembiayaan yang bersifat strategis dapat dikatakan SMKN 1 OKU melakukan upaya-upaya yang ditafsirkan juga akan dilakukan oleh sekolah lain. Dengan demikian, program akreditasi sekolah dan juga program ISO tidak berimplikasi terhadap sistem pengelolaan pembiayaan SMKN 1 OKU.

3.9 . Penciptaan Suasana, Iklim, dan Lingkungan Pembelajaran

Penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif dilakukan melalui berbagai program kegiatan. Program-program tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori: (1) kegiatan pengembangan diri, (2) kegiatan pembiasaan diri, dan (3) kegiatan pembinaan siswa. Program penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang diorganisasikan di dalam *Kurikulum SMKN 1 OKU* adalah Pendidikan Lingkungan Hidup yang diimplementasikan dalam program 9K Plus dan Bank Sampah “*Green Sejahtera*”. Program pembiasaan diri dilakukan melalui kegiatan (a) tadarus sebelum jam pelajaran pertama, (b) piket lingkungan kelas, (c) senam pagi setiap hari Sabtu, dan (d) Sabtu Religi yang dilaksanakan pada Sabtu pertama tiap bulan. Program pembinaan siswa dilakukan dilakukan melalui kegiatan Tim Disiplin Siswa. Hasil analisis terhadap upaya-upaya penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran memperlihatkan bahwa sekolah ini menerapkan sistem pengelolaan yang sungguh-sungguh dan

terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini berdampak kepada tata kelola yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan suasana yang benar-benar kondusif dalam hal kenyamanan lingkungan pembelajaran. Efektivitas dan efisiensi tata kelola penciptaan lingkungan yang baik ini merefleksikan penerapan SMM sebagai standar baku dan berstandar tinggi dari implementasi ISO. Dengan demikian, yang berimplikasi tinggi dalam tata kelola penciptaan lingkungan di SMKN 1 OKU adalah penerapan SMM ISO.

3.10 Pelibatan Masyarakat dan Kemitraan

Pengelolaan pelibatan masyarakat dan pembangunan kemitraan mengacu kepada dokumen (1) *Prosedur Mutu Praktik Kerja Industri*, (2) *Prosedur Mutu Unit Produksi*, (3) *Prosedur Mutu Kerjasama Antar Lembaga*, dan (4) *Prosedur Mutu Pengadaan Barang dan Jasa*. Pada dokumen *RKJM SMKN 1 OKU* dideskripsikan sasaran-sasaran program yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dan kemitraan meliputi (1) penandatanganan MoU dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan/pembuangan sampah, (2) peninjauan ke DU/DI, (3) MoU dengan DU/DI/instansi pemerintah dalam rangka penyusunan kurikulum, praktik kerja industri (Prakerin), penelusuran tamatan, dan pemasaran tamatan, dan *on the job training* (OJT) guru, (4) pelaksanaan Prakerin siswa kelas XII selama dua bulan di DU/DI/instansi pemerintah, (5) OJT untuk guru selama minimal dua bulan, (6) mengundang Komite Sekolah dalam kegiatan sekolah, (7) mengadakan pemasaran tamatan lewat Bursa Kerja Khusus setiap tahun, dan (8) penelusuran tamatan. Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang menjadi acuan SMKN 1 OKU dalam implementasi tata kelola pelibatan

masyarakat dan kemitraan didapat gambaran tentang tingginya implikasi penerapan SMM sebagai standar pengelolaan manajemen berdasarkan ISO. Dengan kata lain, kriteria-kriteria akreditasi sekolah tidak menjadi acuan utama karena secara akumulatif telah terakomodasi oleh implentasi SMM.

3.11 Sistem Manajemen Mutu

Hasil studi dokumen mengidentifikasi 28 dokumen prosedur mutu sebagai implementasi SMM berdasarkan standar ISO. Pada dokumen *Manual Mutu*, yang merupakan induk dari 27 prosedur mutu lainnya, dideskripsikan tentang (1) ruang lingkup SMM, (2) *mapping* proses SMM, (3) persyaratan SMM dengan standar ISO, (4) Manual Mutu, (5) pengendalian dokumen, dan (5) pengendalian rekaman. Adapun, 27 prosedur mutu yang diturunkan dari *Manual Mutu* mengatur berbagai prosedur tata kelola penyelenggaraan manajemen untuk setiap bidang garapan sebagai penerapan SMM ISO. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa SMM yang diimplementasikan di SMKN 1 OKU terimplikasi secara kuat oleh ISO.

3.12 Business Center

Pengelolaan *business center* SMKN 1 OKU mengacu kepada *Prosedur Mutu Unit Produksi*. Pada RKJM, sasaran-sasaran *business center* diterakan pada komponen UP. Sasaran-sasaran tersebut diimplementasikan melalui operasionalisasi Toko dan Kantin (Unit Produksi [UP] PM), Bank Mini dan Kursus Komputer Akuntansi (UP AK), dan Kursus Komputer (UP AP). Toko direalisasikan dengan beroperasinya minimarket *EsMart* (Esemka Satu Mart); kantin melalui *Kantin Bina Bersama*; bank mini melalui beroperasinya BDS. Minimarket *EsMart* dan BDS menarik perhatian karena memperlihatkan (1) tata kelola dengan

perspektif yang mendekati tata kelola profesional dunia bisnis yang karenanya mempertimbangkan aspek profit, (2) keterlibatan yang intensif dari siswa, guru, dan karyawan, (3) pembinaan jiwa kewiraswastaan siswa, dan (4) diproyeksikan untuk menyediakan sebagian kebutuhan sehari-hari warga SMKN 1 OKU. Dalam hal pemenuhan SNP, keberadaan dan sistem tata kelola UP-UP diupayakan untuk memenuhi tuntutan SNP yang berarti tergambar adanya indikasi implikasi akreditasi sekolah. Di sisi lain, keberadaan dan tata kelola UP-UP itu juga mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada pelanggan (*customer service*) yang menjadi “ruh” ISO. Dengan demikian, akreditasi sekolah secara bersama-sama dengan ISO berimplikasi terhadap keberadaan dan tata kelola UP-UP yang dikembangkan di SMKN 1 OKU.

3.13 Program Pengawasan

Pengelolaan pengawasan mengacu kepada (1) *Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen*, (2) *Prosedur Mutu Audit Internal*, (3) *Prosedur Mutu Layanan yang Tidak Sesuai*, (4) *Prosedur Mutu Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran*, dan (5) *Prosedur Mutu Kepegawaian*. Di dalam RKJM dikemukakan ketentuan-ketentuan: (1) supervisi terhadap guru dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun; (2) KS mengadakan evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek persiapan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut; (3) pemantauan proses pembelajaran oleh KS yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan mengadakan diskusi hasil pemantauan. (4) KS menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada guru yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas. (5) KS melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Program-

program pengawasan yang dikembangkan memperlihatkan bahwa (1) program pengawasan yang dilakukan mengindikasikan upaya-upaya pengontrolan yang mengikuti standar umum pengawasan sesuai tuntutan SNP; dan (2) dengan diimplementasikannya prosedur-prosedur mutu SMM, tergambar indikasi upaya-upaya memenuhi tuntutan standar ISO. Dengan demikian, akreditasi sekolah secara bersama-sama dengan ISO berimplikasi terhadap tata kelola program dan implementasi pengawasan yang dikembangkan di SMKN 1 OKU.

3.14 Evaluasi Diri

Berdasarkan studi dokumen terhadap instrumen EDS, SMKN 1 OKU menggunakan lima instrumen berupa angket (kuisisioner) dengan responden (1) KS, (2) guru, (3) siswa, dan (4) komite sekolah dan (5) Instrumen Telaah Silabus dan Pembelajaran. Keempat angket yang disebutkan memuat butir-butir pertanyaan/ Pernyataan berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dan diorganisasikan berdasarkan delapan SNP. Adapun, Instrumen Telaah Silabus dan Pembelajaran diorganisasikan dalam empat bagian yaitu (1) Telaah Silabus, (2) Telaah RPP, (3) Observasi Pembelajaran, dan (4) Lembar Telaah Butir Soal. Hasil dianalisis memperlihatkan dua hal menarik dari sistem EDS: (1) dari segi substansi, komponen-komponen dan item-item yang terspesifikasi di dalam EDS mengikuti muatan substantif yang ada pada SNP; dan (2) format yang digunakan dalam EDS dikembangkan secara kreatif oleh tim MM SMKN 1 OKU berdasarkan alur SMM yang merepresentasikan standar ISO. Dengan demikian, akreditasi sekolah secara bersama-sama dengan ISO berimplikasi terhadap tata kelola EDS yang dikembangkan di SMKN 1 OKU.

3.15 Unsur-unsur Pelaksanaan Akreditasi

Telah dikemukakan bahwa salah satu keputusan strategis tentang tindak lanjut atas hasil-hasil akreditasi sekolah tahun 2011 pada SMKN 1 OKU adalah melakukan tata kelola pemenuhan *assessment* akreditasi sekolah melalui mekanisme SMM sebagai implementasi ISO. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa secara umum pemenuhan SNP dengan sendirinya akan tercapai dengan implementasi SMM. Dengan demikian, SMKN 1 OKU tidak secara khusus mempersiapkan proses akreditasi, tetapi memasukkan item tata kelola persiapan akreditasi sekolah ke dalam agenda implementasi SMM. Dengan kata lain, akreditasi sekolah tidak berimplikasi terhadap tata kelola

unsur-unsur persiapan akreditasi selanjutnya.

Melalui analisis menyeluruh terhadap pembahasan sub 3 di atas secara indeksial teridentifikasi temuan-temuan: (1) 24 item subkomponen SNP untuk Standar Pengelolaan, (2) ada-tidak adanya hubungan implikatif sub-subkomponen tersebut terhadap peningkatan mutu tata kelola SMKN 1 OKU, dan (3) rasionalisasi atas ada-tidaknya hubungan implikatif tersebut. Dua temuan pertama tergambar pada tabel 1. Tabulasi dilakukan dengan memberikan skor 1 (satu) untuk jawaban “Ya” yang merepresentasikan *adanya* implikasi akreditasi sekolah dan skor 0 (nol) untuk jawaban “Tidak” yang merepresentasikan *tidak adanya* implikasi akreditasi sekolah

Tabel 1. Indeks Implikasi Akreditasi Sekolah terhadap Tata Kelola SMK Negeri 1 OKU

No.	Komponen	Ya	Tidak
1.	Perumusan Visi	0	1
2.	Perumusan Misi	0	1
3.	Perumusan Tujuan	0	1
4.	Perumusan RKJM	0	1
5.	Perumusan RKT	1	0
6.	Dokumen Kurikulum	1	0
7.	Kalender Pendidikan	1	0
8.	Struktur Organisasi	0	1
9.	Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	1
10.	Peraturan Akademik	1	0
11.	Tata Tertib Program Keahlian	1	0
12.	Seleksi Penerimaan Siswa Baru	0	1
13.	Layanan Konseling	1	0
14.	Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kokurikuler	0	1
15.	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran	0	1
16.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	0	1
17.	Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan	0	1
18.	Penciptaan Suasana, Iklim, dan Lingkungan Pembelajaran	0	1
19.	Pelibatan Masyarakat dan Kemitraan	0	1
20.	Sistem Manajemen Mutu	0	1
21.	<i>Bisnis Center</i>	1	0

No.	Komponen	Ya	Tidak
22.	Program Pengawasan	1	0
23.	Evaluasi Diri Sekolah	1	0
24.	Unsur-unsur Persiapan Akreditasi	0	1
Jumlah		9	15
%		37,5	62,5

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa akreditasi sekolah hanya berimplikasi terhadap 9 (37,5%) komponen tata kelola sekolah pada SMKN 1 OKU. Selebihnya, yakni 15 (62,5%) komponen tidak terimplikasi oleh hasil-hasil akreditasi sekolah. Rendahnya implikasi tersebut disebabkan oleh telah terakomodasinya sebagian besar kriteria SNP untuk komponen Standar Pengelolaan oleh implementasi SMM sebagai prosedur baku ISO.

Simpulan dan Implikasi Penelitian

1. Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan SNP oleh SMKN 1 OKU untuk semua program keahlian yang diakreditasi mencapai rata-rata bobot maksimal atau dikategorikan sebagai “mendukung fungsi semua komponen dalam proses pembelajaran yang sangat baik”.
- 2) Tindak lanjut atas hasil-hasil akreditasi sekolah dilakukan melalui mekanisme OM-CM-RTM dengan tahapan: (1) sosialisasi pasca-akreditasi; (2) refleksi atas hasil-hasil akreditasi secara umum; (3) inventarisasi hasil-hasil akreditasi sekolah oleh staf terkait; (4) audit internal secara *cross-sectional* atas bahan-bahan yang telah disiapkan oleh staf terkait; (5) presentasi hasil-hasil audit internal oleh WK MM; (6) tindak lanjut berupa Tindakan Perbaikan dan Pencegahan oleh staf

terkait atas temuan-temuan teridentifikasi; (7) pengecekan ulang oleh WK MM dan atas hasil tindak lanjut temuan-temuan; dan (8) pembahasan akhir bersama KS untuk mengambil keputusan atau strategis tentang masalah-masalah yang belum terpecahkan.

- 3) Dari 24 komponen tata kelola sekolah, 9 (37,5%) di antaranya terimplikasi oleh implementasi akreditasi sekolah dan tidak demikian halnya dengan 15 (62,5%) komponen lainnya. Rendahnya implikasi akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu tata kelola sekolah pada SMKN 1 OKU ini disebabkan oleh telah terakomodasinya sebagian besar kriteria SNP untuk komponen Standar Pengelolaan oleh implementasi SMM sebagai prosedur baku ISO.

2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini mengimplikasikan hal-hal sebagai berikut. (1) Dengan implementasi SMM yang menjadi standar ISO, kebijakan internal tentang tata kelola berbagai komponen pengelolaan sekolah lebih diarahkan kepada pemenuhan tuntutan standar ISO. (2) Konsekuensi arah kebijakan tersebut antara lain adalah tuntutan pemenuhan SNP dengan sendirinya untuk sebagian besar telah terakomodasi oleh pemenuhan tuntutan standar ISO. (3) Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa rendahnya indeks implikasi akreditasi sekolah tersebut tidak merepresentasikan

rendahnya mutu tata kelola SMKN 1 OKU, tetapi lebih mempresentasikan kenyataan bahwa Kriteria dan Instrumen Akreditasi SMK/MAK tidak relevan untuk dijadikan parameter peningkatan mutu tata kelola sekolah pada sekolah yang telah memiliki sertifikat standar di atas SNP seperti ISO.

Daftar Pustaka

- ACICS. 2014. *Accreditation Criteria: Policies, Procedures, and Standards*. Washington D.C.: Accrediting Council for Independent Colleges and Schools.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2011. *Laporan BSNP Tahun 2010*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- CHEA. 2012. *The Fundamentals of Accreditation: What Do You Need to Know?* Washington D.C.: Council for Higher Education Accreditation.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal*. Jakarta:Kementerian Pendidikan Nasional.
- Koenig, Ann M. 2004. Higher Education Accreditation in the United States: What International Education Need to Know. Makalah, disajikan pada EAIE Conference, Torino, 18 September 2004.
- Maile, Simeon. 2012. Accountability: An Essential Aspect of School Governance. *South African Journal of Education*, Vol. 22(4) 326—331.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XXXI*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Montagu, Dominic. 2003. *Accreditation and Other External Quality Assessment Systems for Healthcare*. London: British Government's Department For International Development (DFID).
- Sagala, H. Syaiful. 2009. *Desain Organisasi Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Studi Kasus Desain Organisasi Pendidikan yang Efektif pada Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota, Cet. I*. Jakarta: Uhamka Press.
- Sallis, Edward. 2005. *Total Quality Management in Education, Third Edition*. London: Kogan Page.
- Seto, Melanie & Peter J. Wells (Eds.) . 2007. *Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions, 1st Ed.* Bukarest: Unesco-CEPES.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. VIII*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Asep. 2007. Akreditasi, Sertifikasi, dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. Makalah, tidak diterbitkan.